**EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANTAENG**

**KABUPATEN BANTAENG**

**Hasmiah[[1]](#footnote-1)**

**UPBJJ Universitas Terbuka Makassar**

Abstract This study aims to evaluate to what extent the implementation of school-based management in the State Vocational High School 3 Bantaeng., Factors that support and hinder evaluation of the implementation of school-based management in the State Vocational High School 3 Bantaeng. population in this study is principal, teachers, staff, school committee (of the community) with a total of 56 people, In this study, the sample used for the election or census saturated sampling technique, so that the sample in this study is a population which total 56 person. Held data collection techniques for observation, interview and observation and documentation. The results showed that; Application of MBS in Vocational High School 3 Bantaeng at high category, where all indicators supporting MBS have been able to work optimally. Factors that support the implementation of MBS is the managerial ability of high school principals, teachers maximum performance and high levels of education or degree. Factors that inhibit the implementation of MBS is low community participation and income levels are less.

**Keywords: Evaluation, Management, School-Based**

**Pendahuluan**

 Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal pembangunan bangsa, maka diperlukan pendidikan yang memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas dimaksudkan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 39 ayat 2 memberikan penekanan “bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

 Berbagai usaha telah diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan guru melalui pelatihan, pelatihan manejemen kepala sekolah, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu pengelolaan sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Walaupun tidak bisa disangkal bahwa di kota-kota besar peningkatan mutu pendidikan sudah cukup menggembirakan, namun sebaliknya sebagian besar terutama di daerah mutu pendidikan masih sangat memprihatinkan. Salah satu indikator kurangnya keberhasilan pengembangan pendidikan ditunjukkan antara lain dengan nilai evaluasi murni siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

 Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil maksimal. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat infut oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar kepada asumsi bahwa bilamana semua infut pendidikan terpenuhi, seperti penyedian buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga pendidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat makro orieted, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat, propinsi, dan daerah. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat, propinsi, dan kabupaten) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagimana mestinya di tingkat mikro (sekolah), atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pedidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat, propinsi, dan daerah. (Umaedi,1999).

 Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa mutu pendidikan di kabupaten Bantaeng tidak mengalami perubahan yang cukup berarti adalah nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN) selama tiga tahun terkhir ini menunjukkan angka konstan antara 4,50 – 5,50 untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggiris, dan Bahasa Indonesia.

 Berbagai upaya telah dilakukan di kabupaten Bantaeng. Upaya-upaya tersebut antara lain membiayai kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG), memberi isin guru mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dari strata satu (S1) ke strata dua (S2), bahkan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun ajaran 2008/2009 memberi isin tugas belajar kepada guru sebanyak 50 orang, dan dibiayai pemerintah propinsi.

 Organisasi pendidikan yang bermutu tidak muncul dengan sendirinya, begitu pula dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Majene. Veithzal dan sylviana (2008) mengatakan bahwa *the key word in Total Quality Management TQM* is manajemen. Artinya, kata kunci dalam manajamen terpadu adalah manajemen. Syarifuddin (2009) menyatakan bahwa pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu sistem yang secara laus dikenal dalam rangka memberikan kewenangan luas kepada sekolah. Pendekatan ini berangkat pada anggapan dasar bahwa dengan memberikan kewenangan dan kemandirian kepada sekolah akan menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam penegelolaan sekolah. Pelaksanaan MBS akan meningkatkan partisipasi warga sekolah (guru, staf dan masyarakat) dalam proses persekolahan yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas sekolah pada warganya.

 Pengelolaan sekolah melalui MBS yang dicanangkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sejak tahun 1999 dimaksudkan untuk perbaikan tata pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah, baik partisipasi, tranparansi, akuntabilitas, maupun kemandirian dalam pengembangan program dan pembiayaan. Program MBS di sekolah memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, guru, dan masyarakat untuk mengelola sekolah secara optimal dengan kewenangan yang lebih luas. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di dalam pengambilan keputusan pendidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan dalam sitem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasikan secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari sentralisasi kedesentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan. Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai krakteristik yang berbeda dengan sekolah menengah atas lainnya.

**Pengertian Manajemen**

Dilihat dari segi defenisi, banyak rumusan yang telah dikemukakan oleh para sarjana yang bekecimpung dibidang ilmu manajemen. Rumusan yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan yakni didasarkan pada sudut pandang dan latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda, namun hakekat pengertianya kurang lebih sama. Menurut Arismunandar (2002:15) bahwa manajemen didefenisikan sebagai segala aktivitas dalam mengatur, mengkoordinasikan, dan memamfaatkan sumber daya organisasi bagi pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya menurut Sutopo (1999:14) bahwa manajemen adalah proses pengintegrasian, pengkoordinasian dan atau pemamfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien.

 Manajemen menurut Zain (2004:10) adalah suatu proses yang khas yang terjadi dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan melalui pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lebih lanjut Hasibuan (2004: 32) bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Zain (2000:23) bahwa pada hakekatnyamanajemen adalah suatu kerja sama orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang lebih disepakati bersama dengan sistematis, efisien, dan efektif. Sagala (2006:13) mendefinisikan manajemen sebagai proses kerja sama melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi diterapkan pada semua bentuk dan jenis organisasi. Millett dalam (Siswanto) membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Menurut Siswanto (2005:2) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.

 Berdasarkan dari beberapa pengertian manajemen di atas, maka jelaslah bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi melalui pemamfaatan sumber daya manusia lainnya yang dibutuhkan atau suatu usaha mencapai tujuan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.

**Manajemen Berbasis Sekolah**

 Gagasan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan suatu ide yang muncul dari tatanam negara demokrasi yang telah mentradisi dengan sistem desentralisasi seperti di Amerika Serikat. Konsep MBS merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai dengan adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah.

 Dalam buku ”Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah” (Depdiknas, 2001) dikemukakan karakteristik MBS berdasarkan pendekatan sistem yakni karakteristik yang berkenaan dengan masukan (input), proses dan keluaran (output). Pertama, karakteristik masukan sekolah meliputi: 1) memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas; (2) sumber daya tersedia dan siap; (3) staf yang kompoten dan berdedikasi tinggi; (4) memiliki harapan prestasi yang tinggi; (5) fokus pada pelanggang (khususnya siswa); dan (6) input manajemen. Kedua, karakteristik proses sekolah meliputi: (1) proses belajar-mengajar yang efektifnya tinggi; (2) kepemimpinan sekolah yang kuat; (3) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (4) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif; (5) sekolah memiliki budaya mutu; (6) sekolah memiliki teamwork yang kompak,cerdas dan dinamis; (7) sekolah memiliki kewenangan (kemandirian); (8) partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat; (9) sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen; (10) sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik); (11) sekolah memilki evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan; (12) sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan; (13) komunikasi yang baik; dan (14) sekolah memiliki akuntabilitas. Ketiga, karakteristik keluaran (output) sekolah yang diharapkan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Keluaran sekolah dapat diklasifikasi menjadi keluaran berupa prestasi akademik dan prestasi non-akademik.

 Menurut Arismunandar (2006, 51) bahwa ada dua esensi penting MBS yaitu otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif. Otonomi sekolah diartikan sebagai kewengan atau kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri, dan merdeka atau tidak tergantung. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, tokoh masyarakat) didorong untuk lebih terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

 Pengelolaan sekolah sebagai bagian integral dari manajemen pendidikan pada pemerintahan kabupaten/kota adalah memfasilitasi kebutuhan sekolah yang meliputi pengawanan dan pengendalian, pengembangan standar kompetensi siswa, petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa, penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa, monitoring dan evaluasi kerja, membina pengelolaan sekolah, termasuk sekolah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan, sekolah unggulan dan sekolah yang terkena musibah bencana alam. Dilihat dari sudut administrasi, sekolah merupakan bentuk organisasi pendidikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai sumber, di samping sumber yang ada diluar dirinya seperti uang, material, dan waktu. Mutu yang diinginkan tentu berorientasi pada pemakai, baik internal, yaitu para guru dan personel sekolah maupun eksternal, yaitu siswa, masyarakat, pemerintah, dan masyarakat industri atau dunia usaha. Karena itu, sekolah sebagai manajemen yang utuh memerlukan perlakuan dan strategi khusus dalam upaya pengembangannya. Perlakuan dan strategi khusus itu berbeda untuk setiap sekolah walaupun fokus strategi itu berkisar pada penyampaian kurikulum dan pengukuran kemajuan belajar karena prioritas dan alokasi sumber-sumber yang menjadi dasar kebijakan juga memiliki perbedaan. Dengan demikian, prioritas pelayanan belajar di sekolah harus dioperasionalkan oleh pengelola tingkat sekolah (Sagala, 2006; 128).

 Sutjipto (2001:17) menegaskan bahwa kewenangan sekolah untuk secara otonom memutuskan sendiri bersama mitra horizontalnya ada lima yaitu, perumusan tujuan, perencanaan pembiayaan, personalia, kurikulum dan struktur organisasi. Tujuan dimaksud adalah tujuan sekolah sebagai sebuah institusi, yang dikembangkan dari visi, misi dan kemudian dapat dituangkan dalam bentuk program-program strategis sekolah itu sendiri. Implikasi dari perumusan tujuan dan program adalah pembiayaan. Oleh sebab itu, jika perumusan visi, misi dan tujuan serta program strategis sekolah diserahkan pada sekolah sendiri, maka demikian pula dengan perencanaan pembiayaannya. Otonomi sekolah adalah merancang pembiayaan, mengontrol pemakaian, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya itu pada stakeholder yang terlibat dalam penyusunan dan pemenuhan seluruh kebutuhan pembiayaan sekolah.

 MBS merupakan strategi untuk mencapai sekolah efektif. MBS adalah suatu ide dimana kekuatan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar, yakni sekolah itu sendiri. Konsep ini didasarkan pada Self Determination Theory yang menyarakan bahwa apabila seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri, maka orang atau kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan tersebut. Sekolah perlu memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, sebab keputusan setuju dengan kebutuhan dan realitas proses belajar mengajar. Dalam konsep MBS yang utuh, kekuasaan yang dimiliki sekolah mencakup: Pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan kurikulum; keputusan yang berkaitan dengan rekruitmen dan pengelolaan guru dan pegawai administrasi; keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah. Dalam implementasi MBS terdapat 4 (empat) faktor yang penting untuk dicatat: 1. Kekuasaan, 2. Pengetahuan dan skill, 3. Sistem informasi, dan 4. Sistem penghargaan (Gerbang, 2003:16).

 Depdiknas (2002: 35) menyatakan bahwa prinsip-prinsip MBS adalah: (1) keterbukaan, artinya MBS dilakukan secara terbuka dengan sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan tokot masyrakat); (2) kebersamaan, artinya MBS dilakukan bersama oleh sekolah dan masyarakat; (3) berkelanjutan, artinya MBS dilakukan secara berklanjutan tanpa dipengaruhi pergantian pimpinan sekolah; (4) menyeluruh, artinya MBS yang disusun hendaknya mencakup semua komponen yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan, (5) pertanggungjawaban, artinya pelaksanaan MBS dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan; (6) demokratis artinya keputusan yang diambil dalam MBS hendaknya dilaksanakan atas dasar musyawarah antara komponen sekolah dan masyarakat; (7) kemandirian sekolah, artinya sekolah memiliki prakarsa, inisiatif, dan inovatif dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan; (8) berorientasi pada mutu, artinya berbagai upaya yang dilakukan selalu didasarkan pada peningkatan mutu; (9) pencapaian standar minimal secara total, bertahap dan berkelanjutan; dan (10) pendidikan untuk semua, artinya semua anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang sama.

 Pelaksanaan MBS menghasilkan dampak yaitu: (1) MBS telah menciptakan rasa tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat rencana pengembangan sekolah, dan banyak sekolah memajangkan anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada papan sekolah; (2) keterbukaan ini telah meningkatkan motivasi dan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Banyak sekolah yang melaporkan kenaikan sumbangan untuk menunjang sekolah; dan (3) pelaksanaan PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif,efektif dan menyenangkan) dalam MBS, telah mengakibatkan peningkatan dalam kehadiran anak di sekolah. Apabila MBS lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dimana sekolah itu berada (Depdiknas, 2001).

Tabel 1. Ciri-ciri Sekolah yang melaksanakan MBS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisasi Sekolah | Proses Belajar Mengajar | Sumber Daya Manusia | Sumber Daya dan Administrasi |
| * Menyediakan manajemen/organisasi/kepemimpinan transformasi dalam mencapai tujuan sekolah
 | * Meningkatkan kualitas belajar siswa
 | * Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan siswa
 | * Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut setuju dengan kebutuhan.
 |
| * Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri
 | * Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat
 | * Memilih staf yang memiliki wawasan MBS
 | * Mengelola dana sekolah secara efektif dan efesien.
 |
| * Mengelola kegiatan operasional sekolah
 | * Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif
 | * Menyediakan kegiatan pengembangan profesi pada semua staf
 | * Menyediakan dukungan administratif
 |
| * Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat
 | * Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa
 | * Menjamin kesejahteraan staf dan siswa
 | * Mengelola dan memelihara gedung dan sarana.
 |
| * Menggerakkan partsipasi masyarakat
 | * Berperan serta dalam memotivasi siswa
 | * Menyelenggarakan forum/diskusi untuk membahas kemajuan kinerja sekolah
 |  |
| * Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah
 |  |  |  |

**Metode Penelitian**

1. **Variabel penelitian**

 Variabel dalam penelitian ini adalah (1) penerapan MBS yang terdiri atas indikator keterbukaan, partisipasi, kemandirian sekolah, beroririentasi pada mutu, dan akuntabilitas. (2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan MBS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan indikator yang meliputi kemampuan manajerial kepala sekolah, kinerja guru, dan peran serta masyarakat, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

1. **Disain penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriftif yang hanya mendeskrifsikan variabel melalui indikator-indikator dari setiap unsur dari variabel.

1. **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berusaha memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan penerapan MBS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Untuk pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi
2. Kuesioner
3. **Teknik Analisis data**

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriftif kuantitatif. Analisis deskriftif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data penerapan MBS dan faktor-faktor penghambat dan pendorong penerapan MBS. Analisis deskriftif kuantitatif yang digunakan yaitu analisis persentase, nilai terendah, nilai tertinggi, mean, standar deviasi dan diagram batang.

 Pengkategorian yang digunakan adalah acuan patokan yang berdasarkan pada jangkauan dari skor teoritis yang dikelompokkan dalam lima kelas atau ketegori yaitu: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Dalam penelitian ini menggunakan rancangan analisis deskriptif, untuk itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis persentase dengan cara mempersentasekan setiap pertanyaan. Untuk mengetahui penerapan MBS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng Kabupaten Bantaeng digunakan rumus Ali (2000: 184) yaitu :

 Dimana :

% = Persentase

n = Jumlah nilai yang diperoleh

N = Jumlah seluruh nilai (nilai ideal)

**Pembahasan**

1. **Penerapan MBS disekolah**

Berdasarkan hasil penelitian umur responden yang menjadi objek penelitian rata-rata telah memasuki usia dewasa yang berarti tingkat kemampuan berpikir dalam menghadapi suatu masalah dianggap sudah mampu, sehingga responden dapat memberikan jawaban atau persepsi dengan baik terhadap kuesioner yang diberikan. Dari sudut pandang jenis kelamin terlihat bahwa jumlah laki-laki dan perempun tidak terlalu jauh berbeda sehingga distribusi jawaban responden terhadap persoalan yang dihadapi telah mewakili jenis kelamin yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterbukaan dalam penerapan MBS, terlihat kecenderungan jawaban responden tentang penerapan MBS umumnya menyatakan setuju. Hal ini berarti bahwa keterbukaan manajemen sekolah dalam penerapan MBS telah dianggap mampu memberikan kepuasan terhadap seluruh komponen yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng. Kategori keterbukaan penerapan MBS berada pada kategori tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan pada penerpan MBS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng dianggap oleh komponen sekolah telah sesuai dengan apa yang diinginkan.

Indikator partisipasi dalam penerapan MBS, berdasarkan hasil penelitian memiliki kategori yang tinggi, hal ini didasarkan pada rata-rata jawaban responden untuk indikator ini adalah setuju dan rata-rata kesluruhan dari indikator ini berada pada kategori tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penerapan MBS telah mampu bersinergi secara baik meskipun belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan, karena masih banyak jawaban responden dari item pernyataan yang diberikan untuk mengukur indikator partisipasi yang menjawab tidak setuju.

Indikator kemandirian sekolah dalam penerapan MBS berada pada kategori tinggi, kecenderungan seluruh jawaban responden untuk indikator ini menyatakan setuju, hal ini berarti bahwa sekolah telah memiliki kemandirian dalam mengelola manajemen untuk penerapan MBS, meskipun masih ada hal-hal yang secara umum tetap tergantung pada pemerintah daerah dan kebijakan pendidikan secara nasional. Kemandirian sekolah tentunya tetap bertumpu pada dukungan masyarakat, meskipun di daerah ini berlaku atauran pendidikan gratis yang melarang adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan atau permintaan dana dalam hal bantuan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Indikator berorientasi mutu dalam penerapan MBS berada pada kategori tinggi, hal mengacu pada rata-rata jawaban responden menyatakan setuju atas seluruh aitem pernyataan yang diberikan. Hal ini berarti bahwa pihak sekolah mengikutsertakan masyarakat dalam turut menjaga mutu sekolah, dalam hal ini pada proses penyusunan kurikulum sekolah khususnya muatan lokal, selain itu terdapat kebijakan sekolah secara intern terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi turunnya mutu dan meningkatnya mutu sekolah, misalnya hukuman bagi guru yang sering terlambat dalam bentuk teguran lisan ataupun tertulis.

Indikator akuntabilitas dalam penerapan MBS berdasarkan hasil penelitian berada pada kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktifitas yang berkaitan dengan salah satu penunjang penerapan MBS dalam hal ini dana, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat dipergunakan dengan akuntabilitas yang tinggi, hal ini tercermin dari jawaban responden yang rata-rata setuju terhadap keikutsertaan mereka dalam mengontrol penggunaan dana tersebut.

Penemuan ini memberikan informasi bahwa penerapan MBS pada Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng dan kepulauan cenderung ke optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip MBS sebagian sudah terlaksana dengan baik, seperti penggunaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat sudah transparan, berbagai keputusan atau kebijakan yang tidak menunggu lagi perintah dari atasan, dan sebagainya.

Penyebab lainnya adalah sumber daya manusia pada Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng secara keseluruhan sudah dioptimalkan. Meskipun MBS masih baru bagi pihak sekolah dan masyarakat, namun kerjasama yang berjalan dan petunjuk maupun kebijakan dari pihak pemerintah daerah berdampak positif terhadap pelaksanaan MBS.

Upaya yang dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan penerapan MBS pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng adalah lebih meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip MBS seperti manajemen sekolah yang lebih bersifat terbuka, pengambilan keputusan yang lebih demokratis, orientasi terhadap mutu, dan sebagainya. Hal ini setuju dengan pernyataan Depdiknas (2002) tentang penerapan MBS prinsip-prinsip MBS adalah: (1) keterbukaan, artinya MBS dilakukan secara terbuka dengan sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat); (2) kebersamaan, artinya MBS dilakukan bersama oleh sekolah dan masyarakat; (3) berkelanjutan, artinya MBS dilakukan secara berkelanjutan tanpa dipengaruhi pergantian pimpinan sekolah; (4) menyeluruh, artinya MBS yang disusun hendaknya mencakup semua komponen yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan; (5) pertanggungjawaban, artinya pelaksanaan MBS dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan; (6) demokratis, artinya keputusan yang diambil dalam MBS hendaknya dilaksanakan atas dasar musyawarah antara komponen sekolah dan masyarakat; (7) kemandirian sekolah, artinya sekolah memiliki prakarsa, inisiatif, dan inovatif dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan; (8) berorientasi pada mutu, artinya berbagai upaya yang dilakukan selalu didasarkan pada peningkatan mutu; (9) pencapaian standar pelayanan minimal secara total, bertahap dan berkelanjutan, dan (10) pendidikan untuk semua, artinya semua anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang sama.

1. **Faktor yang mendukung pelaksanaan MBS Di** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng
2. **Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan manajerial kepala sekolah, terlihat bahwa:

1. Indikator keterampilan konseptual berada pada kategori tinggi, hal ini berarti bahwa kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng memiliki kemampuan kepemimpinan secara konseptual untuk membimbing dan mengarahkan berbagai pemikiran dari guru dan pegawai untuk mengembangkan sekolah, selain itu ketersedian sarana dan prasarana selalu menjadi pertimbangan dalam nenerapkan suatu kebijakan untuk pengembangan sekolah.
2. Indikator kemampuan sosial berada pada kategori tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa kepedulian kepala sekolah secara sosial dianggap memadai untuk memimpin sekolah dalam penerapan MBS, saran dan masukan dari komponen sekolah tetap menjadi pertimbangan utama dalam melakukan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, pertemuan rutin selalu dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sekolah.
3. Indikator kemampuan teknis kapal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng berada pada kategori tinggi, hal ini berarti bahwa kepala sekolah secara teknis dianggap mampu memimpin sekolah dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan ada setiap akhir tahun, penilaian kinerja guru dalam satu tahun, penentuan prioritas suatu kebutuhan yang akan diadakan dan seluruh hal-hal lain yang bersifat teknis.

Berdasarkan hasil jawaban responden secara keseluruhan diperoleh kategori untuk kemampuan manajerial kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng yaitu kategori sedang, hal diukur dari rata-rata jawaban responden secara keseluruhan. Hal ini dimungkinkan oleh masih banyaknya jawaban responden yang berada pada kategori sedang dan rendah untuk setiap item pernyatan yang diberikan. Selain itu masih banyak hal-hal lain yang menyangkut kepemimpinan yang belum dieksplorasi secara maksimal dalam penelitian ini. Sehingga secara umum kemampuan manajerial kepala sekolah dianggap mamapu menjadi faktor pendukung penerapan MBS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng.

 Keberhasilan ini ditunjang juga oleh penetuan visi dan misi sekolah yang sudah dirumuskan secara tertulis, sehingga menjadi pedoman bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Penunjang lainnya adalah dalam penerapan MBS kepala sekolah tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan, sarana dan prasarana sekolah, mendengar saran dan pendapat, dan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan laporan yang dibuat.

Selain itu kemapuan manajerial kepala sekolah yang mendukung penerapan MBS juga disebabkan dari kepala sekolah sendiri yang mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah sebagai seorang pimpinan tidak serta merta memerintah hanya berdasarkan ide atau pendapatnya saja, tetapi sangat memperhatikan ide atau pendapat dari semua elemen seperti guru, pegawai dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Disisi lainnya juga kepercayaan masyarakat bertambah oleh karena umumnya program kerja yang telah dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan. Meskipun demikian dalam penerapan MBS kepala sekolah masih perlu lebih meningkatkan kemampuan manajerial melaui pelatihan atau penataran. Dalam pelatihan atau penataran tersebut menekankan pentingnya daripada tugas-tugas manajerial untuk dijalankan dalam rangka menyukseskan jalannya organisasi.

Menurut Stoner dalam Handoko (1999), mengemukakan bahwa ada delapan macam fungsi manajer yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi yaitu: (1) bekerja dengan, dan melaui orang lain, (2) bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, (3) dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, (4) berpikir secara realistis dan konseptual, (5) adalah juru penengah, (6) adalah seorang politisi, (7) adalah seorang diplomat, dan (8) pengambil keputusan tersulit.

Kedelapan fungsi manajer yang dikemukakan oleh Stoner tersebut tentu saja berlaku bagi setiap manajer dari organisai apapun, termasuk kepala sekolah. Selanjutnya Wahjosumidjo (2001) menguraikan kedelapan fungsi manajer tersebut sebagai berikut: (1) kepala sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain. Pengertian orang lain yaitu mencakup guru, staf, siswa serta pihak-pihak lain yang perlu berhubungan dan bekerja sama. Ini berarti kepala sekolah berperilaku sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah: (2) kepala sekolah bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan. Dalam hal ini kepala sekolah mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang dilakukannya, serta bertanggung jawab atas perbuatan para guru, staf, dan siswa: (3) dengan waktu dan sumber yang terbatas seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Dengan segala keterbatasan, seorang kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara tepat. Bahkan seharusnya dapat menetukan suatu prioritas bilamana terjadi konflik antara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah: (4) kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konsepsional. Ini menuntut setiap kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui suatu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang fleksibel. Demikian pula kepala sekolah harus mampu melihat setiap tugas sebagai suatu keseluruhan yang saling berkaitan.: (5) kepala sekolah sebagai juru penengah. Dalam lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi, di dalamnya tak terhindarkan pertentangan atau konflik antar anggota organisasi. Untuk itu kepala sekolah harus turun tangan sebagai penengah atau pelerai: (6) kepala sekolah sebagai politisi. Sebagai politisi kepala sekolah harus senantiasa berusaha meningkatkan tujuan organisasi juga mengembangkan program jauh kedepan. Untuk itu kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerja sama melalui pendekatan persuasif dan kesepakatan: (7) kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam peranannya sebagai diplomat dalam berbagai macam pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi dari sekolah yang dipimpinnya: (8) kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil keputusan yang sulit. Sekolah sebagai suatu organisasi tidak luput dari berbagai persoalan dan kesulitan. Apabila terjadi persoalan dan kesulitan, kepala sekolah diharapkan berperan sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalan dan kesulitan yang dihadapi.

Upaya peningkatan kemampuan manajerial tersebut juga harus didukung pula oleh keterampilan yang harus dimiliki kepala sekolah. Menurut Stoner dalam Fattah (2000), mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas manajerial, paling tidak diperlukan tiga macam keterampilan, yaitu: (1) keterampilan teknis, adalah kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknis, dan pengetahuan mengenai bidang khusus: (2) keterampilan manusiawi , adalah kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu atau dalam kelompok: dan (3) keterampilan konseptual, adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktifitas organisasi. Ketiga keterapilan ini penting bagi seorang manajer, namun kepentingan relatifnya tergantung pada kedudukan manajer tersebut dalam organisasi. Abbas membedakan tiga macam orang manajer yaitu, manajer puncak, manajer menengah, manajer tingkat bawah. Masing-masing jenjang manajer memerlukan tiga keterampilan tersebut. Keterampilan teknis paling penting dalam tingkat bawah. Keterampilan manusiawi, walaupun penting untuk manajer di setiap tingkat, merupakan keterampilan primer yang diperlukan oleh manajer menengah, kemampuan mereka untuk memperoleh keterampilan teknis dan bawahannya lebih penting daripada keahlian teknisnya sendiri. Akhirnya, kepentingan dari keterampilan konseptual bertambah kalau kita bergerak melewati peringkat sistem manajemen.

**Kinerja Guru**

Berdasarkan kecenderungan jawaban responden tentang kinerja guru menyatakan setuju. Penemuan ini memberikan informasi bahwa kinerja guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng sangat mendukung dalam penerapan MBS. Kinerja guru terbukti dari tiga indikaotr yang menjadi tolak ukur, ketiganya berada pada kategori tinggi bahkan ada yang sangat tinggi. Perencanaan pengajaran dilakukan oleh gur-guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng dengan baik, pengelolan pengajaran pun demikian dan penilaian hasil belajar dilakukan berdasrkan aspek-aspek yang menjadi tujuan utama penilaian yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang disinergikan dengan baik sehingga menghasilkan penilaian secara adil, menyeluruh, sistematis dan kredibel.

Tugas pengajaran dilaksanakan dengan baik, seperti dalam pembuatan satuan pelajaran dimana guru membuatnya sebelum pelaksanaan PBM. Oleh karena adanya perencanaan mengajar sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Begitu juga dalam pelaksanaan evaluasi yang lebih menonjolkan aspek pemahaman dan penguasaan materi agar siswa dapat memecahkan sendiri soal-soal yang diberikan kepadanya.

Dengan adanya MGMP dalam rangka peningkatan kemampuan mengajar guru, keikutsertaan guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng sangat aktif dalam kegiatan MGMP tersebut. Guru diberikan arahan tentang teknik mengajar yang baik. Bagi yang ada kesulitan juga dipersilahkan untuk mengutarakannya dan diberikan pemecahannya. Pembinaan tersebut juga berlangsung dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Instruktur atau pemandu mata pelajaran langsung melihat secara langsung PBM dikelas. Sehingga guru yang mengajar belum baik, langsung diberikan arahan atau saran mengenai metode yang harus dilakukannya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja guru adalah dengan memanfaatkan dan memberikan semangat yang lebih intensif bahwa mengajar merupakan pengabdian yang sangat besar. Dalam arti pemerintah daerah memahami faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kinerja seseorang. Setuju pendapat Thoha (1996) mengemukakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor individu dan faktor lingkungan organisasi. Adapun faktor individu meliputi: kemampuan; kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, penghargaan dan sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan organisasi meliputi: hirarki organisasi, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, sistem pengendalian, kepemimpinan dan sebagainya.

Selanjutnya Burhanuddin (2007) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok faktor diri (individu) dan kelompok faktor situasional. Kelompok diri antara lain bakat, sifat, minat, usia, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman, motivasi dan sebagainya. Faktor diri ini datang dari dalam diri karyawan dan sebagian telah ada sebelum karyawan datang ke tempat kerjanya. Semua faktor dalam diri tidak mudah untuk diubah, tanpa perubahan dari faktor luar atau situasi pekerjaan. Faktor situasional adalah faktor yang sumbernya dari luar kerja, dibedakan menjadi dua faktor fisik pekerjaan dan faktor sosial pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng dapat menjadi faktor pendukuang penerapan MBS, karena kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng sangat mampu diandalkan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.

**Tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan responden secara rata-rata adalah sarjana, sehingga hal ini menjadi penunjang penerapan MBS, karena pendidikan seseorang mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilakunya dalam aktifitas sehari-hari, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tanggap terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilingkungannya. Juga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tingkat analisisnya akan lebih cepat dan lebih mudah menerima dan memahami norma-norma baru termasuk dalam peningkatan mutu pendidikan.

Deskripsi tentang tingkat pendidikan formal diperoleh hasil penelitian adalah sarjana. Tingkat pendidikan yang mayoritas sarjana sangat memadai dalam penerapan MBS. Karena dengan tingkat pendidikan seperti itu akan membantu penerapan dalam pelaksanaan MBS, dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi akan lebih memudahkan dalam melakukan inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Juga daya kreatif akan lebih mudah untuk dikembangkan. Dan yang lebih penting dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi akan memudahkan dalam penerapan MBS di sekolah. Oleh karenanya tingkat pendidikan yang cukup tinggi termasuk sebagai salah satu faktor pendukung dalam penerapan MBS di sekolah.

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten yang sangat peduli dengan peningkatan mutu pendidikan termasuk di dalamnya peningkatan kualitas sumber daya Guru. Selain pelaksanaan MGMP yang secara rutin dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemda pangkep juga memberikan kesempatan kepada para guru yang ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, dalam hal ini pemberian Beasiswa S2 kepada beberapa orang guru untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Negeri Makassar ( UNM) , yang mana program ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Dan program ini akan sangat bermamfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Setuju pendapat Heidjrachman (1999) mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan persoalan dalam mencapai tujuan. Lebih lanjut Tilaar (2000) menyatakan bahwa pada hakekatnya proses pendidikan merupakan proses pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada keberdayaan masyarakat dan bangsanya.

1. **Faktor yang menghambat penerapan MBS di**  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng**.**
2. **Peran serta masyarakat.**

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan peran serta masyarakat dalam penerapan MBS berada pada kategori kurang. Dari tiga indikator yang diukur, bantuan fisik berada pada kategori sedang, yang berarti bahwa masyarakat agak kurang peduli terhadap kegiatan pembangunan fisik di sekolah dalam hal ini masyarakat cenderung untuk tidak membantu secara fisik kegiatan yang ada di sekolah. Indikator bantuan finansial juga berada pada kategori sedang artinya sumbangan masyarakat dalam bentuk finansial untuk pembangunan sekolah kurang mampu membantu sekolah dalam peningkatan infrastuktur penunjang pencapaian prestasi tinggi terutama dalam penerapan MBS. Indikator bantuan ide merupakan indikator yang berada pada kategori rendah, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat kurang memiliki kemampuan atau kepedulian untuk turut serta menyumbangkan pemikiran dalam upaya peningkatan mutu sekolah dengan adanya penerapan MBS.

Sehingga dengan kecenderungan jawaban responden tentang peran serta masyarakat umumnya menyatakan kurang. Maka penemuan ini memberikan informasi bahwa peran serta masyarakat pada sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng tidak mendukung penerapan MBS. Baik bantuan fisik, bantuan finansial dan bantuan yang berupa ide.

Hal ini memiliki sebab utama yaitu adanya Program pemerintah Propinsi sulawesi selatan dan pemda Bantaeng mengenai program pendidikan Gratis. Hal inilah yang menyebabkan pihak sekolah enggan atau bahkan takut untuk melibatkan masyarakat terutama yang berhubungan dengan bantuan finansial dan adanya larangan untuk sama sekali tidak diperbolehkan sekolah meminta iuran dalam bentuk apapun kepada masyarakat sementara disisi lain dana pendidikan Gratis tidak mampu untuk menutupi semua kebutuhan sekolah. Hal ini diperparah oleh kurang pahamnya masyarakat tentang program pendidikan gratis, masyarakat banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya program Gratis maka semuanya serba Gratis dan tidak ada lagi peran serta masyarakat karena sudah diambil alih pemerintah propinsi dan pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan finansial. Anggapan ini juga yang kemudian mengakibatkan bentuk bantuan lain masyarakat terhadap sekolah juga menjadi berkurang atau bahkan sama sekali tidak ada seperti bantuan fisik, tidak ada lagi gotong royong antara masyarakat dan pihak sekolah dalam membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, juga bantuan masyarakat yang memilki keahlian tertentu untuk mengajar siswa juga tidak kelihatan kalaupun itu semuanya harus dibayar. Selanjutnya dalam penuangan ide-ide masyarakat juga kurang terlibat seperti dalam peranan pengambilan keputusan jika ada rapat.

Lebih lanjut Depdiknas (2001) dalam konteks MBS, peran serta masyarakat memang amat luas, tapi karena berbagai sebab pelaksanaannya masih terbatas, seperti berikut:

1. Keterlibatan masyarakat (orang tua murid, anggota komite sekolah, tokoh masyarakat, dan sebagainya) tidak hanya dalam memberikan dukungan dana, atau sumbangan yang berupa fisik saja, tapi bisa lebih dari itu.
2. Untuk saat ini, peran serta masyarakat ini sudah dapat dianggap baik jika dapat berperan dalam bidang pengelolaan sekolah, umpamanya ikut merencanakan kegiatan dan kemungkinan pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut, tidak hanya diberi rencananya setelah semua final, sehingga ada kesan hanya untuk basa basi dan stempel resmi dari komite sekolah/masyarakat saja.
3. Juga dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan menambah guru yang tidak ada atau kurang atau bahkan menjadi guru pengganti, umpama guru agama, kesenian, pramuka sampai pada mengganti guru mata pelajaran lainnya. Jadi komite sekolah dan tokoh masyarakat benar-benar merupakan mitra sejajar kepala sekolah dan para guru.
4. Peran serta masyarakat yang ideal tentunya akan masuk lebih jauh lagi, mereka dapat membicarakan pelaksanaan KBM, kinerja para guru, prestasi belajar anak-anak dan kendala yang mereka hadapi, bagaimana mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan lain sebagainya.

**Tingkat pendapatan**

Deskripsi tentang tingkat pendapatan diperoleh hasil penelitian terletak antara Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000. Tingkat pendapatan yang seperti ini menjadi penghambat dalam penerapan MBS. Oleh karena kebutuhan pokok masyarakat sekarang semakin tinggi, demikian juga pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, serta diperparah lagi jika tanggungan keluarga juga besar.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dalam mencapai kesuksesan penerapan MBS pemerintah daerah selain tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, harusnya kegiatan tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan pendapatan masyarakat dan guru. Oleh karena pendapatan yang memadai, maka tingkat kesejahteraan juga akan terpenuhi dan perhatian dalam pendidikan akan meningkat. Setuju pendapat Darma (1985) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari ukuran tersebut diketahui apakah masyarakat tertentu berada di bawah atau di atas garis kemiskinan.

Sementara itu Sucipto (2001) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu: (1) kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau keluarga misalnya sandang, pangan, dan papan; (2) kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan umum dan memperbaiki kemampuan individu untuk memproduksi dalam memenuhi kesejahteraan, misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, lembaga politik, dan lain-lain; (3) kebutuhan untuk memperbaiki jalur kehidupan demi meningkatkan kesejahteraan seperti sumber daya, modal, kesempatan kerja, dan pendapatan umum; dan (4) kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dan kebebasan untuk mengambil keputusan seperti hak asasi manusia, partisipasi politik, dan aturan hukum.

**Penutup**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan MBS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng berada pada kategori tinggi, dimana semua indikator penunjang MBS telah mampu bekerja secara optimal.
2. Faktor yang mendukung penerapan MBS adalah kemampuan manajerial kepala sekolah yang tinggi , kinerja guru yang maksimal dan tingkat pendidikan yang tinggi atau sarjana.
3. Faktor yang menghambat penerapan MBS adalah peran serta masyarakat yang rendah dan tingkat pendapatan masyarakat yang kurang.
4. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka yang menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kepada kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng hendaknya lebih meningkatkan lagi penerapan MBS di sekolah dengan lebih menekankan kepada bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut ikut dalam menunjang kesuksesan penerpan MBS.
2. Kepada guru, pegawai dan semua unsur di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng, hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan peran sertanya dalam membantu penerapan MBS agar dapat berjalan dengan sukses.
3. Kepada masyarakat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bantaeng hendaknya meningkatkan peransertanya dalan menunjang penerapan MBS di sekolah agar prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan.

**Daftar Pustaka**

Abbas, H, dkk. 2001. *Pendidikan Bebasis Masyarakat Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta, Adicita

Arismunandar, 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah: Antara Harapan dan Kenyataan*. Makalah. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta Bekerja Sama deng Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia.

Burhanuddin, 2007. *Supervisi Pengajaran Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru kaitannya dengan Kinerja Guru SMA Negeri di Polewali Mandar,* Tesis. PPs UNM

Danim, Sudarman. 2005. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta, Bumi Aksara.

Darma. 1985. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidikan*. Bandung, Pustaka setia.

Depdiknas. 1990. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

---------------. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

---------------. 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual)*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

--------------. 2007. *Panduan Manejmen Berbasis Sekolah*. Jakarta, direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Fattah, A. Abd. 2000. *Analisis Kemampuan Manajerial Kepala Sekola pada Sekolah Menengah Pertama Umum di Makassar*. Tesis.Makassar. PPS UNM.

Gerbang, 2003. *Menjadi Guru Profesional (menciptakan Pembelajaran Pengembangan Profesi Guru*). Jakarta, Rajawali Pers.

Husain A, 1991. *Dasar-dasar kepemimpinan*. Jakarta. Depdikbud.

Handoko H, 1999. *Manajemen Edisi ke-2.* Yogyakarta. BPFE.

Hasibuan. S. P, 2004. *Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Indrafachrudi, Soekarto. 1984. *Bagaimana Memimpin Sekolah Yang Efektif*. Malang, Ghalia Indonesia.

Ihsan. Fuad, 1996. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Prawirosentosa, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*. Bandung. BPFE.

Reksohadipradjo, Sukamto, 1996. *Dasar-dasar manajemen.*Yogyakarta. BPFE.

Sagala, Syaiful. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta, Nimas Multima.

Siagian, 1996. *Teori Motivasi dan Aplikasinya.* Jakarta. Rineka Cipta

Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sucipto et, al, 2001. *Reformasi pendidikan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta. Adicita

Sutopo. 1999. *Administrasi Manajemen dan Organisasi*. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Thoha Miftah, 1996. *Prilaku Organisasi (Konsep dasar dan Aplikasi)*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Tilaar H.R.A. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan nasional.*Jakarta, Rineka Cipta.

Umaedi, 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Umum Indonesia. Jakarta

Veithzal dan Sylviana, 2008. *Education Management.*Jakarta. Rajagrafindo Perkasa.

Wahjosumidjo. 1999. Kepemimpinan Abad ke-21. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Zain, Muhammad. 2004. Evaluasi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Dasar Binaan United Nation Chilrden”s Fund di Kecamatan Tinambung dan Kecamatan Tapango Kabupaten Polmas. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

1. Dosen UPBJJ Universitas Terbuka Makassar [↑](#footnote-ref-1)